



Visi Provinsi Sumatera Utara
"Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat"

Misi Provinsi Sumatera Utara

- MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM KEHIDUPAN KARENA MEMILIKI IMAN DAN TAQWA, TERSEDIAKANYA SANDANG PANGAN YANG CUKUP, RUMAH YANG LAYAK, PENDIDIKAN YANG BAIK, KESEHATAN YANG PRIMA, MATA PENCAHARIAN YANG MENYENANGKAN, SERTA HARGA - HARGA YANG TERJANGKAU
- MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM POLITIK DENGAN ADANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL, DAN TERPERCAYA, POLITIK YANG BERETIKA, MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN MEMILIKI KOHESI SOSIAL YANG KUAT SERTA HARMONIS
- MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PENDIDIKAN KARENA MASYARAKATNYA YANG TERPELAJAR, BERKARAKTER, CERDAS, KOLABORATIF, BERDAYA SAING DAN MANDIRI
- MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM PERGAULAN KARENA TERBEBAS DARI JUDI, NARKOBA, PROSTITUSI DAN PENYELUNDUPAN, SEHINGGA MENJADI TELADAN DI ASIA TENGGARA DAN DUNIA
- MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM LINGKUNGAN KARENA EKOLOGINYA YANG TERJAGA, ALAMNYA YANG BERSIH DAN INDAH, PENDUDUKNYA YANG RAMAH, BERBUDAYA, BERPRIKEMANUSIAAN DAN BERADAB

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

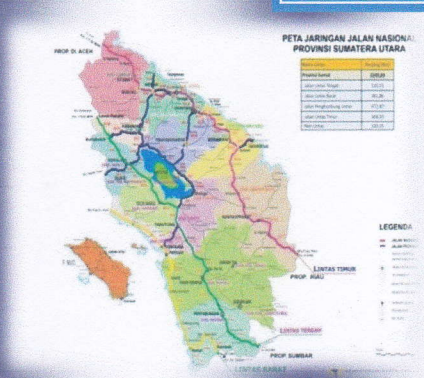
DINAS TENAGA KERJA



**TEKUN
BERKARYA**

**HIDUP
SEJAHTERA**

**MULIA
BERBUDAYA**



**DINAS TENAGA KERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
JL. ASRAMA NO. 143 MEDAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Struktur Organisasi.....	1
B. Isu-Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. Capaian Kinerja	8
B. Realisasi Anggaran	12
BAB IV PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	
LAMPIRAN I PERNYATAAN REVIEW	
LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	

BAB I PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan disempurnakan kemudian dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara diatur kemudian dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada Provinsi.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - i. Sub Bagian Umum
 - ii. Sub Bagian Keuangan
 - iii. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - i. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
 - ii. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

- iii. Seksi Latihan Standarisasi Kompetensi Pemagangan
- d. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - i. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
 - ii. Seksi Persyaratan Kerja,
 - iii. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
- e. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - i. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan,
 - ii. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
 - iii. Seksi Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :
 - i. Seksi Fasilitas Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Permasalahan,
 - ii. Seksi Pembangunan Permukiman,
 - iii. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1. UPT Pelatihan Tenaga Kerja Daerah terdiri dari :
 - i. Subag Tata Usaha'
 - ii. Seksi Penyipan Tenaga Kerja Terampil
 - iii. Seksi Pelatihan Pengembangan Produktivitas dan Brebasis Masyarakat
 - 2. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja (Cakupan Kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat), terdiri dari :
 - i. Subag Tata Usaha'
 - ii. Seksi Penegakan Hukum
 - iii. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja (Cakupan Kerja Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi) terdiri dari :

- i. Subag Tata Usaha'
 - ii. Seksi Penegakan Hukum
 - iii. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Dinas Tenaga Kerja (Cakupan Kerja Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat) terdiri dari :
- i. Subag Tata Usaha'
 - ii. Seksi Penegakan Hukum
 - iii. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja (Cakupan Kerja Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan) terdiri dari :
- i. Subag Tata Usaha'
 - ii. Seksi Penegakan Hukum
 - iii. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Dinas Tenaga Kerja (Cakupan Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas) terdiri dari :
- i. Subag Tata Usaha'
 - ii. Seksi Penegakan Hukum
 - iii. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Dinas Tenaga Kerja (Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli)) terdiri dari :
- i. Subag Tata Usaha'
 - ii. Seksi Penegakan Hukum
 - iii. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi,
- b. Perumusan kebijakan perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi,
- d. Pelaksanaan administrasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan tahun 2013-2018, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai isu-isu, antara lain :

1. Tingginya tingkat pengangguran;
2. Tingkat pendidikan sebagian besar tenaga kerja masih rendah sehingga menjadi ancaman semakin tingginya angka pengangguran dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN;
3. Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
4. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
5. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis;

6. Sarana dan Prasarana pelatihan kerja tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi;
7. Kurangnya Instruktur di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
8. Rendahnya kepesertaan Jamsostek
9. Rendahnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam menerapkan norma keselamatan kerja.

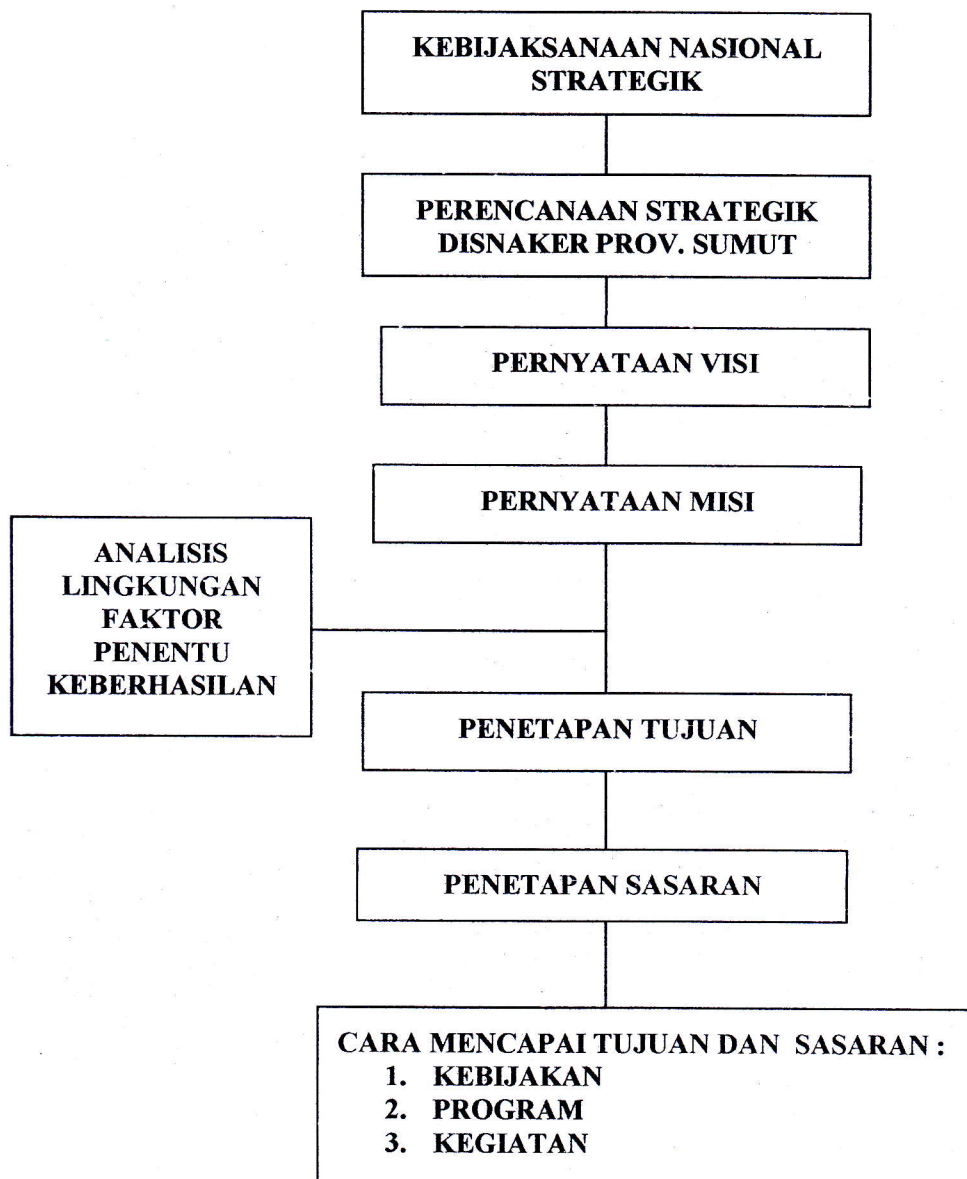
Di bidang ketransmigrasian, isu-isu yang diperkirakan masih mewarnai dinamika lima tahun ke depan adalah :

1. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas;
2. Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan;
3. Kurangnya keterkaitan antar kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
4. Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah satu dengan yang lain;
5. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan Rencana Jangka Menengah Lima Tahunan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Tahun 2013-2018 yang dibuat secara bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal, organisasi, adapun model perencanaan strategik adalah sebagai berikut :



Target dan sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Gubernur Sumatera Utara terpilih. Dalam target capaian kinerja Rencana Strategis tersebut ditetapkan target kinerja tahunan yang merupakan output dari Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Sumber Laporan Kinerja tahun 2018 adalah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018, Perjanjian Kerja tahun 2018 dan Daftar Pelaksanaan Anggaran 2018. Mempedomani DPA tahun 2018 disusun dan ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 merupakan penetapan target kinerja tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018 mengikuti format yang terbaru. Dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah DPA Tahun 2018. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja tahun 2018, maka uraian lebih lanjut tentang penetapan kinerja Dinas Tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Target Kinerja Tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2017
1	2	3	5
		KETENAGAKERJAAN	
1.	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Rasio Penduduk Yang Bekerja	0.955
		2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0
		3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.250
2.	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	1. Angka Sengketa/Aspirasi Pengusaha dan Pekerja per tahun (Kasus)	15
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan (Nasional dan Pemerintahan Daerah)	1.250

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil evaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran alokasi sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

A. CAPAIAN KINERJA

Target Kinerja Tahun 2018 dan Capaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera utara sesuai dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

**Tabel 3.1
Target Kinerja dan Capaian Target Kinerja Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Capaian 2018
1	2	3	5	6
		KETENAGAKERJAAN		
1.	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,955	0,944
		2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0	5,56
		3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.250	15.000
2.	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	4. Angka Sengketa/Aspirasi Pengusaha dan Pekerja per tahun (Kasus)	15	312
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan (Nasional dan Pemerintahan Daerah)	1.500	1.576

.Penjelasan atas indikator kinerja dan target kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah upaya untuk menekan persentase tingkat penangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 adalah 5,60 % dan target pengurangan tingkat pengangguran sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2018 adalah 5,00 % sedangkan realisasi capaian target kinerja adalah 5,56 %. Capaian target tidak terpenuhi

0,56 % yang berarti masih belum berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan 0,5 %, Persentase tingkat pengangguran pada tahun 2018 diperoleh dari hasil pembagian jumlah angkatan kerja yang menganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen. Hasil tersebut ditunjukkan dari angka sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\% \text{ TPT} &= \text{Jumlah Penganggur Terbuka/Angkatan Kerja} \times 100 \% \\ &= 396.000/7.124.000 \\ &= 5,56 \%\end{aligned}$$

- 2) Rasio Penduduk yang Bekerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2018, rasio penduduk yang bekerja ditargetkan 0.955 sedangkan realisasi capaian target kinerja tahun 2018 adalah 0,944

$$\begin{aligned}\text{Rasio Penduduk Yang Bekerja} &= \text{Penduduk bekerja/Jumlah Angkatan Kerja} \\ &= 6.366.000/6.743.000 \\ &= 0,944\end{aligned}$$

- 3) Pencari Kerja yang ditempatkan adalah tenaga kerja yang sudah bekerja dan pencari kerja yang mencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2018 ditargetkan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.250 Orang. Realisasi pencapaian target kinerja jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2018 adalah 15.000 Orang. Realisasi penempatan tenaga kerja sangat jauh melampaui target yaitu 1.250 orang. Kelebihan pencapaian target sebesar 13.750 orang karena kemajuan penggunaan Teknologi Informasi.
- 4) Angka sengketa/aspirasi pengusaha dan pekerja per tahun (kasus) diselesaikan adalah jumlah sengketa/perselisihan yang timbul akibat hubungan kerja dan diselesaikan yang didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2018 angka sengketa/perselisihan hubungan kerja tahun 2018 yang didaftarkan 665 kasus. Sedangkan jumlah kasus sengketa/perselisihan hubungan kerja tahun 2018 yang diselesaikan adalah 312 kasus sedangkan target 15 kasus.
- 5) Perusahaan yang menerapkan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan (Nasional dan Pemerintah Daerah) adalah jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan dan peraturan

ketenagakerjaan pada tahun 2018 ditargetkan adalah 1.500 perusahaan namun tercapai pada tahun 2018 adalah 1.576 perusahaan, sehingga disimpulkan bahwa jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan mengalami peningkatan sebesar 76 Perusahaan.

Perbandingan Target Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian target Kinerja tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Capaian	
			2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	KETENAGAKERJAAN					
1.	Meningkatnya Pelebaran Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,95	0,95	0,941	0,944
		2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	5,438	5,0	4,5	5,60
		3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.000	1.250	1.117	15.000
2.	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	1. Angka Sengketa/Kasus	25	15	42	312
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan	1.250	1.500	1.320	1.576

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Target 2018

Pada tabel berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target kinerja tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi tahun 2017 dengan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Capaian
			2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6
		KETENAGAKERJAAN			
1.	Meningkatnya Pelebaran Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Rasio Penduduk Yang Bekerja	0.95	0.955	0,944
		2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5	5,0	5,60
		3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.000	1.250	15.000
2.	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	1. Angka Sengketa/Kasus	25	15	312
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	1. Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan	1.250	1.500	1.576

Sesuai dengan tabel diatas dapat diasumsikan sebagai berikut :

- Untuk indikator pengurangan tingkat pengangguran diasumsikan tidak tercapai tahun 2018 yaitu 0,011 poin terjadi penurunan dari target 0,955 % tercapai hanya 0,944.
- Untuk indikator Rasio Penduduk terjadi peningkatan di tahun 2018 sekitar 0,60 poin yaitu dari target 5,0 menjadi 5,60.
- Untuk indikator pencari kerja yang ditempatkan dapat tercapai capaian kinerja tahun 2018 yaitu sebanyak 15.000 orang dari target 1.250; orang, terjadi kenaikan jumlah menjadi 13.750 orang.
- Untuk indikator Angka Sengketa/Kasus tercapai peningkatan 312 kasus tahun 2018 dari target 15 kasus terjadi peningkatan angka sebesar 298 kasus.
- Untuk indikator jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan terjadi peningkatan 76 perusahaan dari target 1.500 perusahaan menjadi 1.576 perusahaan .

Analisis Penyebab tidak tercapainya Capaian Kinerja terhadap target kinerja

Beberapa penyebab dari tidak tercapainya capaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Tidak stabilnya kondisi perekonomian nasional yang berpengaruh pada bertambahnya jumlah pengangguran pada tahun 2018.

2. Kurang matangnya perencanaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
3. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
4. Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia untuk mengemban tugas.

Sedangkan hal-hal yang mendukung tercapainya beberapa target kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Semakin luasnya sistem informasi berbasis internet yang dapat digunakan masyarakat luas untuk memahami peraturan penegakan hukum ketenagakerjaan.
2. Adanya kesadaran masyarakat pengusaha dan tenaga kerja dalam mengupayakan hubungan industrial yang harmonis.
3. Terlaksananya kegiatan Dinas Tenaga Kerja yang mendukung pencapaian sasaran kinerja.

Untuk mengatasi permasalahan tidak tercapainya target kinerja ini dapat diberikan solusi sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran pada Dinas Tenaga kerja secara signifikan,
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara,
3. Perumusan kebijakan dengan instansi terkait untuk memperoleh kebijakan dan penanganan masalah ketenagakerjaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran tahun 2018

No.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI			KET
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK	
	DANA P.APD PROV.SU.					
1.	Belanja Tidak Langsung	43.193.460.095,-	41.539.627.188,-	96,17	100,00	
2.	Belanja Langsung	9.284.225.964,-	8.534.634.805,-	91,93	95,17	
	JUMLAH DANA APBD 2017	52.477.686.059,-	50.074.261.993,-	95,42	97,78	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, Laporan Kinerja tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap capaian kinerja Tahun Anggaran 2018. Beberapa indikator kinerja utama tidak dapat tercapai yang disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal. Sehingga di masa yang akan datang perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi perencanaan program kegiatan untuk mencapai target kinerja pada indikator kinerja utama.

Medan, Januari 2019



Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Utara

HARIANTO BUTARBUTAR, SE, MSI
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680916 199503 1 005

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
TIM LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA.
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

Review bertujuan memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

**MEDAN, JANUARI 2019
KETUA TIM LAPORAN KINERJA**



**Drs. PUKKA SITUMORANG
PENATA TK. I
NIP. 19631212 199610 1 001**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRANCISCO BANGUN, SH, MH
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI M.Si
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2018

Pihak Kedua
GUBERNUR SUMATERA UTARA


Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI M.Si

Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA


FRANCISCO BANGUN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610412 198603 1 006

PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
: 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,955
		2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0
		3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1250 Orang
2.	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	4. Angka Sengketa / Aspirasi Pengusaha dan Pekerja per tahun (Kasus)	15 Kasus
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	5. Jumlah Perusahaan yang menerapkan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan (Nasional dan Pemerintah Daerah)	1500 Perusahaan
4.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	6. Jumlah Transmigran yang ditempatkan	200 Orang

Medan,

2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA


Dr. Ir. H. TENGKUERRY NURADI M.Si


FRANSISCO BANGUN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610412 198603 1 006

PERJANJIAN KINERJA

DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
: 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Pencematan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,955	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1. Pelatihan Tenaga Kerja Non Institusional 2. Bimbingan konsultasi Peningkatan Produktivitas 3. Pelatihan Wirausaha Baru Produktif bagi Wirusaha Baru	Rp 831.880.170 Rp 397.332.900 Rp 227.594.210 Rp 206.953.060	TW III TW II, IV TW III, IV
		2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1. Perluasan Kesempatan Kerja Sistem Padat Karya Infrastruktur 2. Monitoring dan Evaluasi TKA 3. Fasilitas Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang 4. Satuan Tugas TKI 5. Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja	Rp 974.183.303,6 Rp 663.221.301,6 Rp 22.377.680 Rp 207.193.170 Rp 30.916.500 Rp 50.474.652	TW III TW III TW II TW IV TW I
2	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan 4. Angka Sengketa / Aspirasi Pengusaha dan Pekerja per tahun (Kasus)	1250 Orang 15 Kasus	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1. Rapat Depeda dan Monitoring Upah Pekerja Perusahaan Kab/Kota se Provsu	Rp 387.218.005 Rp 387.218.005	TW III
3	Meningkatnya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan (Nasional dan Pemerintah Daerah)	1500 Perusahaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1. Pembinaan Motivasi Pengawas Ketenagakerjaan 2. Penanganan Kasus Ketenagakerjaan 3. Komparasi Ketenagakerjaan ke Sidoarjo Prov. Jawa Timur (pengawas dan SP/SSB) 4. Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Sumatera Utara 5. Sosialisasi pencegahan dan peredaran narkoba di perusahaan-perusahaan Kab/Kota	Rp 710.474.106 Rp 233.170.690 Rp 68.824.211 Rp 130.512.850 Rp 126.924.435 Rp 151.041.920	TW III TW I, II, III, IV TW IV TW II, IV TW III
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang ditempatkan	200 Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 1. Fasilitas upaya penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi 2. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Pulau Terluar dan Daerah Perbatasan Provinsi SU 3. Training Needs Assessment	Rp 480.653.484 Rp 119.701.064 Rp 83.945.720 Rp 277.006.700	TW II, IV TW III TW II

SUMBER DANA	
	APBD
831.880.170,00	
974.183.303,60	APBD
387.218.005,00	APBD
480.653.484,00	APBD
2.673.934.962,60	

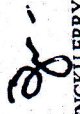
ANGGARAN	
	Rp
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp
Jumlah	Rp

Medan, 2018

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA


FRANSISCO BANGUN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610412 198603 1 006

GOVERNOR SUMATERA UTARA


Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI M.Si